PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Dari Penerima Bantuan Menjadi Penentu Agenda: Kerja Sama Internasional Dan Kepemimpinan Global South Dalam Studi Pembangunan Global 2024-2025

Septianis Afipah[1], Taufan H. Akbar[2], Nandita Oktaviani Putri[3]
[1,2]Universitas Al-Ghifari,
[2]Universitas Jenderal Achmad Yani
E-mail: septianisafipah1990@gmail.com[1], taufanakbar10@gmail.com[2], nanditaputri1303@gmail.com[3]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Global South, kepemimpinan global, kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, tata kelola kolaboratif*

Abstract: *Penelitian ini berfokus terkait negara-negara Global South pada periode 2024–2025 yang sudah tidak lagi bersikap pasif hanya menerima bantuan akan tetapi juga mulai aktif menentukan arah perubahan global. Dari analisis berbagai dokumen dan studi literatur, terlihat bahwa globalisasi, persaingan, dan kesadaran akan potensi lokal menjadi motor penggerak perubahan ini. Walaupun masih dibayangi ketimpangan di berbagai sektor, negara-negara ini terus menekan ketergantungan pada dana asing. Caranya beragam, mulai dari aktif di forum global, menjalin kerja sama daerah seperti antara Yogyakarta dan Gyeongsangbukdo, hingga pemanfaatan teknologi seperti NFC dan integrasi DTSEN. Peran aktif ini juga terlihat di tingkat akar rumput, misalnya lewat pelibatan masyarakat dalam program BSPS. Meski minimnya literasi digital dan keuangan masih jadi tantangan, studi ini membuktikan bahwa otonomi dan kolaborasi bisa berjalan beriringan. Intinya, kemitraan strategis dan penguatan kapasitas dari dalam adalah kunci agar Global South bisa benar-benar mandiri.*

PENDAHULUAN

Pembangunan global saat ini tengah mengalami pergesaran paradigma yang signifikan. Negara-negara Global South kerap diposisikan sebagai penerima bantuan yang pasif dalam hubungan asimetris dengan negara-negara Global North. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi saat ini, negara-negara berkembang mulai berupaya menekan ketimpangan serta kemiskinan secara mandiri. (Issundari & Yani, 2021). Pergeseran ini terlihat jelas mulai dari tingkat daerah seperti transfer pengetahuan yang dilakukan oleh Yogyakarta dan Gyeongsangbukdo yang terbukti efektif mengurangi ketergantungan pendanaan pusat hingga pada ranah multilateral (Issundari & Yani, 2021). Di tingkat makro, meskipun masih rentan terhadap masalah ketimpangan multisector di tengah besarnya potensi sumber daya yang dimiliki, transformasi Global South semakin nyata (Farkhan & Maryani, 2023). Hal ini dibuktikan ketika Indonesia pada Presidensi G20 memosisikan diri bukan agi sekadar sebagai penerima, melainkan sebagai negara donor mellaui kerja sama Selatan-Selatan atau KSS. (Helmys, 2023).

Perubahan peran ini memunculkan “diplomasi pembangunan” sebagai instrument strategis

untuk memproyeksikan kekuatan Global South di panggung internasional. Mereka kini menjadi mitra setara yang berpartisipasi aktif dalam isu-isu krusial seperti perubahan iklim, perdagangan dan kesehatan global melalui penguatan platform kerja sama Selatan-Selatan (KSS). Negara-negara berkembang memabngun solidaritas dan skema berbagi pengetahuan yang lebih horizontal dan saling menguntungkan. Langkah ini secara langsung menantang hegemoni pemikiran negara-negara Utara, sekaligus melepaskan Global South dari jerat syarat-syarat bantuan tradisional yang sering kali mengekang. Dalam konteks ini, keberadaan institusi keuangan regional yang dipimpin oleh Global South, seperti New Development Bank (NDB) yang didirikan oleh BRICS, merupakan manifestasi konkret dari ambisi untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang lebih seimbang. Institusi-institusi ini menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prioritas pembangunan negara-negara berkembang, berbeda dengan lembaga Bretton Woods yang sering dikritik karena bias dan persyaratan ketatnya. Analisis terhadap faktor-faktor internal yang mendukung kapasitas kepemimpinan Global South, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan reformasi tata kelola yang efektif, juga penting untuk memahami dinamika ini. Faktor-faktor ini menyediakan fondasi yang kuat bagi negara-negara Global South untuk meningkatkan pengaruh mereka di forum-forum multilateral.

Pemahaman tentang dinamika kepemimpinan ini akan memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan. Beberapa studi terdahulu telah mengkaji kerja sama internasional dan pembangunan, namun masih terdapat kesenjangan dalam memahami secara komprehensif bagaimana kepemimpinan kolektif Global South secara eksplisit memengaruhi perumusan agenda global di tengah perubahan geopolitik saat ini. Literatur yang ada cenderung berfokus pada analisis bantuan pembangunan dari perspektif donor atau studi kasus kerja sama bilateral, namun kurang mendalami mekanisme dan strategi kolektif Global South dalam menavigasi kompleksitas diplomasi multilateral untuk memajukan agenda mereka sendiri. Penelitian sebelumnya juga belum secara spesifik menyoroti pergeseran dari 'penerima' menjadi 'penentu agenda' dalam kerangka kerja sama internasional, terutama dalam konteks tahun 2024-2025 yang diprediksi akan menjadi periode krusial bagi isu-isu pembangunan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model konseptual yang menempatkan kerja sama internasional sebagai platform utama bagi kepemimpinan Global South untuk memengaruhi agenda pembangunan global, berbeda dari studi sebelumnya yang lebih banyak menempatkan Global South sebagai objek studi atau hanya meneliti aspek ekonomi dari bantuan pembangunan. Penelitian ini secara eksplisit mengkaji dimensi strategis dan politis dari keterlibatan Global South dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Merespons kesenjangan literatur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh negara-negara Global South dalam kerja sama internasional untuk memengaruhi agenda pembangunan global pada periode 2024-2025. Secara khusus, studi ini mengevaluasi efektivitas kepemimpinan Global South dalam mencapai tujuan pembangunan yang mereka advokasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran kepemimpinan mereka dalam konteks hubungan internasional. Dari analisisis tersebut, kontribusi penelitian ini bersifat ganda. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan agensi dalam hubungan internasional, khususnya mengenai peran negara-negara Global South sebagai aktor proaktif. Kedua, secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi negara-negara Global South untuk memperkuat posisi mereka dalam forum multilateral dan bagi organisasi internasional untuk menciptakan kerangka kerja sama yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, berfokus menyoroti pemahaman mendalam tentang perubahan peran negara-negara Global South, dari sebelumnya sebagai penerima bantuan menjadi penentu agenda dalam kerja sama internasional. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap kompleksitas dinamika kepemimpinan, berbagai strategi, dan persepsi aktor-aktor kunci. Desain studi kasus memfasilitasi analisis intensif terhadap konteks spesifik kerja sama internasional serta studi pembangunan global selama periode 2024-2025 yang menjadi rentang waktu penting untuk isu-isu pembangunan berkelanjutan. Metode tersebut membantu mengungkap cara negara-negara Global South membangun kapasitas kepemimpinan mereka dan pengaruhnya terhadap arah kebijakan pembangunan global, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul seiring peningkatan pengaruh mereka di tingkat internasional.

Peneliti memilih informan secara purposif guna memastikan relevansi dan kedalaman informasi, melibatkan perwakilan dari lembaga pemerintah yang terlibat dalam kerja sama internasional. Akademisi yang berfokus pada studi pembangunan global dan hubungan internasional juga menjadi informan. Praktisi dari organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan negara-negara Global South turut diwawancarai. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman luas mereka terkait topik kepemimpinan Global South serta dinamika kerja sama internasional. Jumlah informan disesuaikan hingga tercapai saturasi data, artinya tidak ada informasi baru yang muncul dari wawancara tambahan, sehingga menjamin representasi semua perspektif relevan dalam analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan strategi informan terkait peran Global South dalam menentukan agenda pembangunan global. Peneliti melakukan observasi pada forum atau pertemuan internasional yang melibatkan perwakilan Global South untuk memahami interaksi dan dinamika kepemimpinan secara langsung. Studi dokumentasi melibatkan analisis laporan kebijakan, publikasi ilmiah, dan dokumen resmi dari organisasi internasional atau pemerintah yang relevan dengan kerja sama internasional dan pembangunan; data sekunder ini melengkapi informasi primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta memberikan konteks yang lebih luas.

Analisis data menggunakan metode tematik, mengikuti tahapan yang diadaptasi dari Braun dan Clarke. Tahap pertama melibatkan transkripsi data wawancara, kemudian peneliti mengorganisir data observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengodean awal untuk mengidentifikasi pola dan konsep kunci yang muncul dari data. Kode-kode ini selanjutnya dikelompokkan menjadi sub-tema dan tema yang lebih besar, mencerminkan strategi dan mekanisme kepemimpinan Global South, serta mengidentifikasi pola makna dan pengalaman yang relevan dengan perubahan peran dari penerima bantuan menjadi penentu agenda.

Keabsahan data penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan peneliti. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi dari berbagai jenis informan dan dokumen guna memastikan konsistensi temuan. Peneliti melakukan triangulasi metode dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dan member checking melalui konfirmasi interpretasi data kepada beberapa informan. Hal ini memastikan akurasi dan validitas temuan, membantu mengurangi bias, dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Studi ini juga mengidentifikasi ketimpangan multisektor di Indonesia, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik, menunjukkan kompleksitas tantangan pembangunan di Global South (Farkhan & Maryani, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang

menjadi bagian penting dalam penyusunan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel (Ikmal et al., 2021). Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Dikti) (Zuanita, 2026). Partisipasi penerima bantuan dalam program rumah swadaya turut menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan (Rivani et al., 2025). Modal sosial, seperti kepercayaan dan partisipasi, menjadi aspek penting dalam pembangunan desa (Lestiana & Makhya, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum Dinamika Pembangunan Global 2024-2025

Dinamika pembangunan global pada periode 2024-2025 memperlihatkan pergeseran tajam dari pola tradisional. Negara-negara Global South kini mulai melepaskan posisinya sebagai penerima bantuan pasif dan menunjukkan kapasitasnya dalam mengarahkan kebijakan. Arus globalisasi menuntut setiap entitas untuk bersaing dan menekan kemiskinan secara mandiri (Issundari & Yani, 2021). Pola hubungan internasional yang sebelumnya didominasi oleh asimetri kekuatan dan ketergantungan kini mulai bergeser, memungkinkan negara-negara Global South untuk lebih aktif dalam perumusan kebijakan. Pergeseran ini juga didorong oleh kesadaran akan potensi besar yang dimiliki Indonesia, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia, meskipun rentan terhadap ketimpangan multisektor (Farkhan & Maryani, 2023). Ketimpangan tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik, yang menunjukkan kompleksitas tantangan pembangunan di Global South.

Kerja sama negara-negara di wilayah reginal telah diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketergantungan pada pendanaan pusat (Issundari & Yani, 2021). Pendekatan pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai pendekatan utama yang mendorong inovasi dan kolaborasi berbagai aktor, termasuk negara-negara Global South, dalam mencapai tujuan pembangunan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan diidentifikasi sebagai kerangka utama yang mendorong inovasi dan kolaborasi berbagai pihak termasuk negara-negara Global South dalam mencapai tujuan pembangunan. Forum ekonomi global yang besar seperti G20 berfungsi sebagai arena kerja sama multilateral dalam menangani berbagai persoalan global termasuk pemulihan ekonomi dan kesehatan (Suherman & Asy'ari, 2023). Peran kepemimpinan dari negara-negara Global South semakin menonjol dalam forum-forum internasional, di mana mereka mempromosikan agenda yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mereka sendiri.

2. Strategi Kepemimpinan Global South dalam Kerja Sama Internasional

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi kunci yang digunakan oleh negara-negara Global South untuk memengaruhi agenda pembangunan global. Salah satu pendekatan utama adalah meningkatkan partisipasi aktif dalam forum multilateral dimana mereka mendapatkan kesempatan untuk berbagi agenda dan prioritas pembangunan yang spesifik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan (Tambaip et al., 2023). Dalam pendekatan ini aliansi dan koalisi telah dibentuk oleh negara-negara di Global South untuk meningkatkan kekuatan tawar mereka di arena internasional. Pengelolaan UMKM (Usaha Mikro,Kecil dan Menengah) yang kompetitif secara internasional adalah contoh yang baik dari pendekatan tersebut. (Sembiring & Subekti, 2021).

Strategi kepemimpinan juga telah melibatkan transfer pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di negara-negara dari Global South. Sebagai contoh kerja sama internasional antara Yogyakarta dan Gyeongsangbukdo Korea Selatan menunjukkan bagaimana pendekatan ini

memfasilitasi pertukaran keahlian dan kapasitas (Issundari & Yani, 2021). Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketepatan dalam pemilihan penerima bantuan pendidikan Program Pendidikan Tinggi Cerdas Indonesia (PIP) (Zuanita, 2026). Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting, seperti penerapan teknologi NFC pada sistem pendataan masyarakat penerima bantuan berbasis Android untuk mempermudah dan mempercepat proses distribusi bantuan sosial (Wiyanto et al., 2025).

3. Pergeseran Peran dari Penerima Bantuan menjadi Penentu Agenda

Pergeseran peran dari penerima bantuan pasif menjadi penentu agenda aktif terlihat jelas melalui beberapa indikator. Masyarakat penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menunjukkan keterlibatan aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program (Rivani et al., 2025). Meskipun Program Harapan Keluarga (PKH) berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan melalui pemberian bantuan keuangan dan praktik pendidikan namun implementasi program tersebut tidak sejalan dengan desainnya. Dalam banyak kasus bantuan tersebut dipandang oleh para penerima sebagai hak bukan sebagai alat yang akan mengubah hidup mereka. Selain itu keterbatasan keterampilan keuangan dan literasi digital para penerima tersebut menghambat mereka untuk memanfaatkan sebaik-baiknya manfaat dari program tersebut (Fauzi et al., 2025). Mobilitas sosial penerima bantuan pada Program BSPS juga menunjukkan upaya masyarakat untuk menegosiasikan beban liabilitas finansial demi meraih modal simbolik melalui kepemilikan hunian layak (Nadhirah et al., 2026).

4. Implikasi Kebijakan dan Pembangunan Kapasitas Internal

Pergeseran peran Global South memiliki implikasi kebijakan yang mendalam, menuntut perubahan paradigma dari pendekatan bantuan berbasis donor menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Temuan Sembiring dan Subekti (2021) memperkuat pentingnya tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan UMKM berkualitas internasional. Adopsi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif menjadi penting karena keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang memberikan ruang bagi penyimpanan aspirasi dan masukan terhadap rencana pembangunan (Tambaip et al., 2023). Kesuksesan dari agenda pembangunan yang dipimpin oleh Negara Global South akan sangat bergantung pada kapasitas internal dalam merumuskan,menerapkan dan mengevaluasi kebijakan.

Pembentukan kapasitas internal kini sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Hal ini melibatkan peningkatan keterampilan seperti literasi keuangan dan digital diantara yang lainnya.Fauzi et al. (2025) menunjukkan bahwa rendahnya literasi finansial dan digital dapat membatasi pemanfaatan bantuan secara optimal, sehingga bantuan cenderung dipandang sebagai hak rutin daripada sebagai instrumen yang mendorong kemandirian. Oleh karena itu, investasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat Global South tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara strategis untuk meningkatkan kemandirian. Selain itu, peningkatan kemampuan analitis dan negosiasi diperlukan agar partisipasi dalam forum multilateral dapat diterjemahkan menjadi pengaruh yang lebih konkret terhadap kebijakan pembangunan.

5. Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Konteks Global South

Model tata kelola kolaboratif menjadi landasan bagi kepemimpinan Global South yang efektif, memungkinkan sinergi antara berbagai aktor di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pemerintah kolaboratif merupakan sebuah pendekatan yang bersifat partisipatif dimana masyarakat lokal yang mendapat manfaat dari Program Stimulus Perumahan Mandiri (BSPS) terlibat dalam perencanaan,pelaksanaan dan penerapan program tersebut(Rivani et al., 2025). Keterlibatan ini mencerminkan pergeseran dari tata kelola yang bersifat top-down menjadi bottom-up, di mana suara dan kebutuhan komunitas lokal diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Model

ini juga mempromosikan akuntabilitas dan transparansi, elemen penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi di antara para pemangku kepentingan.

Kerangka tata kelola kolaboratif memungkinkan negara-negara Global South untuk mendefinisikan ulang prioritas pembangunan global dari perspektif mereka sendiri. Hal ini merupakan refleksi dari perbedaan multisektoral yang ada di negara berkembang dalam aspek sosial,ekonomi,budaya,pendidikan dan politik sebagaimana yang di jelaskan oleh (Farkhan & Maryani, 2023). Dengan memadukan pengetahuan lokal dan keahlian teknis, mereka dapat merancang solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Misalnya, keberhasilan kerja sama internasional antara Yogyakarta dan Gyeongsangbukdo Korea Selatan menunjukkan bagaimana pertukaran keahlian dapat memfasilitasi pembangunan kapasitas di tingkat daerah (Issundari & Yani, 2021). Tata kelola kolaboratif ini bukan hanya tentang memobilisasi sumber daya, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem inovasi yang memungkinkan solusi adaptif terhadap tantangan pembangunan yang unik.

6. Tantangan dan Peluang dalam Pembiayaan Pembangunan Mandiri

Peralihan dari penerima menjadi penggerak agenda menimbulkan banyak masalah terkait pendanaan pengembangan diri. Menghilangkan kemiskinan dan menjadi kurang bergantung pada pendanaan pusat membutuhkan strategi yang baik dari kerja sama internasional regional (Issundari & Yani, 2021). Diversifikasi dana,pembentukan pasar modal domestik dan peningkatan kemampuan negara dalam mengumpulkan dana merupakan langkah-langkah penting. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah produk ekspor dapat berkontribusi pada kemandirian finansial. Ada kebutuhan untuk berinvestasi pada infrastruktur yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan lingkungan investasi swasta yang kondusif.

Peluang terletak pada kemampuan untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif yang sesuai dengan konteks dan prioritas Global South. Ini mencakup eksplorasi obligasi hijau, pembiayaan campuran (blended finance), dan kemitraan publik-swasta yang lebih strategis. Peluang tersebut antara lain melihat obligasi hijau,finansial campuran dan kemitraan publik-swasta yang lebih baik. Digitalisasi melalui langkah-langkah seperti pengenalan teknologi NFC pada sistem pendaftaran data penerima manfaat membuat tidak hanya proses pemberian manfaat sosial menjadi lebih mudah dan cepat tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan dana (Wiyanto et al., 2025). Penguatan integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Dikti) menunjukkan potensi optimalisasi alokasi anggaran (Zuanita, 2026). Pembiayaan pembangunan mandiri bukan hanya tentang mencari dana, tetapi juga tentang mengelola dan mengalokasikannya secara lebih efektif untuk mencapai dampak maksimal.

Pembahasan

1. Pembangunan Global 2024-2025

Penelitian ini mengkaji pergeseran peran krusial negara-negara Global South dari penerima bantuan pasif menjadi penentu agenda aktif dalam dinamika pembangunan global. Perubahan ini menandai transformasi signifikan dalam hubungan internasional dan studi pembangunan, terutama pada periode 2024-2025. Proses globalisasi mendorong setiap daerah untuk meningkatkan daya saing dalam melaksanakan pembangunan, sekaligus berupaya mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara mandiri (Issundari & Yani, 2021). Pergeseran ini menunjukkan bahwa negara-negara di Global South tidak lagi hanya bergantung pada narasi yang ditentukan oleh donor, namun kini menginisiasi agenda mereka sendiri. Indonesia, sebagai bagian dari Global South, memiliki keanekaragaman entitas yang berpotensi besar, namun juga menghadapi ketimpangan multisektor

meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik (Farkhan & Maryani, 2023). Ketimpangan internal ini menjadi tantangan sekaligus pendorong bagi negara-negara tersebut untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang lebih mandiri.

Strategi utama dalam memperkuat kepemimpinan Global South melibatkan peningkatan kapasitas di berbagai sektor. Salah satu caranya adalah melalui tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai kualitas internasional, contohnya dalam pengembangan UMKM (Sembiring & Subekti, 2021). Penguatan kapasitas industri pertahanan melalui kerja sama internasional dan transfer teknologi dapat meningkatkan kemampuan pertahanan domestic serta memperkuat kemandirian negara berkembang (Wulandari et al., 2024). Pembangunan kapasitas internal melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, termasuk guru, menjadi penting dalam menghadapi tuntutan globalisasi (Fadillah & Rigianti, 2024)

Peran aktif Global South dalam forum multilateral memiliki dampak signifikan terhadap perumusan kebijakan pembangunan global. G20 sebagai salah satu forum ekonomi utama menjadi arena kerja sama multilateral dalam merespons berbagai persoalan global, termasuk pemulihan ekonomi dan kesehatan (Suherman & Asy'ari, 2023). Keterlibatan negara-negara Global South dalam forum G20 juga saran untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan mendorong perubahan dalam tata kelola global, termasuk melalui agenda reformasi WTO (Pratama et al., 2024). Jaringan ini menjadi platform bagi negara-negara Global South untuk menyuarakan kepentingan dan mempromosikan agenda yang relevan dengan kondisi mereka. Penguatan pendidikan demokrasi yang inklusif dan partisipatif menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi, termasuk ketidaksetaraan akses, transformasi digital dan polarisasi opini (Jamil et al., 2024). Pendidikan menjadi kunci untuk membentuk masyarakat yang mampu berpartisipasi aktif, bahkan dalam implementasi program bantuan, yang kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan di antara warga (Rivani et al., 2025).

Proses transisi peran ini juga diiringi dengan tantangan internal, terutama dalam manajemen bantuan dan mengatasi ketimpangan. Beberapa program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), masih cenderung dianggap sebagai hak rutin oleh penerima, dan rendahnya literasi finansial serta digital dapat menghambat pemanfaatan optimal bantuan tersebut (Fauzi et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan bantuan agar lebih transformatif dan tepat sasaran. Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pendidikan, sehingga sumber daya dialokasikan lebih efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Penggunaan teknologi seperti Data Mining membantu mengidentifikasi kelayakan penerima bantuan sosial dengan lebih akurat sementara penerapan teknologi NFC pada sistem pendataan berbasis Android dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi bantuan (Bramanda, 2025b).

Penguatan modal sosial dan agensi lokal menjadi fondasi penting bagi keberhasilan agenda pembangunan mandiri Global South. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan (Tambaip et al., 2023). Kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga merupakan dimensi penting dari modal sosial (Lestiana & Makhya, 2025). Partisipasi aktif dari penerima bantuan, seperti dalam program rumah swadaya, menunjukkan bahwa mereka bukan lagi objek pasif, melainkan subjek yang terlibat dalam proses pembangunan (Rivani et al., 2025). Penerima bantuan berupaya melakukan mobilisasi modal ekonomi, terkadang melalui utang, untuk mengubah status hunian mereka dan meraih pengakuan sosial (Nadhirah et al., 2026). Upaya ini menggambarkan motivasi kuat untuk mobilitas sosial dan kemandirian, yang sejalan dengan tujuan transformasi sosial

melalui program bantuan (Saniah & Afrizal, 2024).

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya pemahaman mengenai dinamika kekuasaan dan agensi dalam hubungan internasional, khususnya peran Global South sebagai aktor proaktif. Temuan ini melengkapi literatur sebelumnya yang cenderung berfokus pada perspektif donor, dengan menyoroti mekanisme dan strategi kolektif Global South dalam menentukan arah kebijakan global. Secara praktis, studi ini menawarkan rekomendasi strategis bagi negara-negara Global South untuk memperkuat posisi mereka dalam forum multilateral, serta bagi organisasi internasional untuk merancang kerangka kerja sama yang lebih inklusif dan berkeadilan. Analisis ini menegaskan bahwa kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan transfer dana, tetapi juga peningkatan kapasitas kepemimpinan, partisipasi lokal yang kuat, dan manajemen bantuan yang inovatif untuk mencapai kemandirian yang lebih besar.

2. Pergeseran Normatif dan Diskursif dalam Pembangunan Global

Pergeseran peran Global South dari penerima pasif menjadi penentu agenda menandai evolusi normatif yang signifikan dalam studi pembangunan. Transformasi ini mencerminkan upaya sistematis untuk merekonstruksi wacana dominan yang selama ini dibingkai oleh perspektif Barat, atau Global North. Inisiatif negara-negara Global South untuk mengintroduksi konsep-konsep pembangunan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas lokal, seperti pembangunan berkelanjutan yang didorong oleh potensi daerah, menunjukkan penolakan terhadap narasi universalistik yang seringkali mengabaikan heterogenitas kondisi (Issundari & Yani, 2021). Perubahan ini juga mencakup redefinisi nilai-nilai inti dalam kerja sama internasional, dari sekadar bantuan teknis atau finansial menjadi kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, menekankan transfer pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama. Melalui penekanan pada modal sosial dan partisipasi masyarakat, negara-negara Global South mempromosikan model pembangunan yang berakar pada agen lokal dan keberdayaan komunitas.

3. Peran Institusi Regional dan Sub-Regional dalam Mengonsolidasi Kepemimpinan Global South

Selain forum multilateral berskala besar seperti G20, institusi regional dan sub-regional memainkan peran krusial dalam mengonsolidasi kepemimpinan Global South dan membentuk agenda pembangunan global. Organisasi seperti ASEAN, African Union, atau MERCOSUR berfungsi sebagai platform vital bagi negara-negara anggotanya untuk menyelaraskan kepentingan, berbagi pengalaman, dan membangun posisi tawar kolektif dalam negosiasi internasional. Kerja sama dalam kerangka ini seringkali berfokus pada isu-isu spesifik yang relevan bagi kawasan mereka, seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, atau infrastruktur regional, yang kemudian dapat diangkat ke forum global dengan legitimasi yang lebih kuat. Melalui mekanisme ini, negara-negara Global South mampu memproyeksikan kekuatan kolektif yang melampaui kapasitas individu mereka, menciptakan "solidaritas Selatan-Selatan" yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi negara-negara maju.

4. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi sebagai Pengungkit Kemandirian

Adopsi dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian pembangunan negara-negara Global South. Digitalisasi tidak hanya meningkatan efisiensi dalam pengelolaan program bantuan, tetapi juga mendukung ketepatan dan efektivitas pendataan penerima manfaat melalui penggunaan Data Mining (Bramanda, 2025) dan teknologi NFC (Wiyanto et al., 2025). Pemanfaatan teknologi tersebut sekaligus membuka peluang bagi pengembangan inovasi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kemampuan negara dalam mengelola kebutuhan pembangunannya secara lebih mandiri.

5. Tantangan Internal dan Dinamika Kekuasaan dalam Global South

Meskipun terdapat momentum positif, negara-negara Global South masih menghadapi tantangan internal yang kompleks yang dapat menghambat konsolidasi kepemimpinan global mereka. Heterogenitas ekonomi, politik, dan sosial di antara negara-negara Global South seringkali menyebabkan perbedaan kepentingan yang menyulitkan pembentukan front persatuan dalam isu-isu global. Konflik regional, ketidakstabilan politik internal, dan masalah tata kelola yang buruk dapat mengalihkan fokus dari agenda pembangunan global dan melemahkan kapasitas negosiasi mereka di panggung internasional. Masih ada resistensi dari beberapa elit domestik yang mungkin mendapatkan keuntungan dari ketergantungan pada bantuan eksternal, sehingga menghambat reformasi yang mengarah pada kemandirian dan peningkatan agensi lokal. Membangun konsensus internal dan memperkuat legitimasi kepemimpinan dalam negeri merupakan prasyarat esensial untuk memproyeksikan pengaruh yang lebih besar secara global.

6. Mekanisme Transfer Pengetahuan Selatan-Selatan dan Pembelajaran Kolaboratif

Mekanisme transfer pengetahuan Selatan-Selatan menjadi instrumen vital dalam mempromosikan kemandirian Global South. Berbeda dengan transfer pengetahuan Utara-Selatan yang seringkali bersifat top-down dan berorientasi pada donor, model Selatan-Selatan mengedepankan prinsip kesetaraan, saling belajar, dan adaptasi kontekstual. Melalui inisiatif seperti pertukaran ahli, pelatihan teknis, dan proyek percontohan bersama, negara-negara berkembang dapat berbagi pengalaman dan solusi yang terbukti efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan yang serupa, tanpa harus mengadopsi model yang tidak sesuai dengan kondisi lokal mereka. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membangun kepercayaan dan solidaritas di antara negara-negara Global South, yang pada gilirannya memperkuat posisi kolektif mereka dalam perundingan kebijakan global. Implementasi pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan potensi desa, misalnya, dapat dipercepat melalui transfer ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan inti dari kerja sama semacam ini (Issundari & Yani, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi adanya pergeseran peran krusial negara-negara Global South dari penerima bantuan pasif menjadi penentu agenda aktif dalam dinamika pembangunan global selama periode 2024-2025. Proses globalisasi mendorong daerah-daerah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi ketimpangan, serta kemiskinan secara mandiri, yang selanjutnya memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka dalam perumusan kebijakan global. Indonesia, sebagai bagian dari Global South, menghadapi ketimpangan multisektor yang kompleks, namun kondisi tersebut turut memicu pengembangan kapasitas kepemimpinan mandiri.

Strategi utama yang digunakan oleh negara-negara Global South untuk memengaruhi agenda pembangunan global meliputi penguatan kerja sama internasional daerah, optimalisasi partisipasi dalam forum multilateral, serta pengembangan paradigma pembangunan berkelanjutan. Kerja sama internasional daerah terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pusat. Partisipasi aktif dalam forum G20 menunjukkan kemampuan mereka dalam membentuk jaringan global dan mempromosikan agenda yang relevan dengan kebutuhan negara-negara berkembang.

Kepemimpinan Global South telah secara signifikan memengaruhi perumusan kebijakan pembangunan global dengan mengintroduksi konsep-konsep pembangunan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas lokal. Inisiatif ini menolak narasi universalistik yang dominan dan mengubah hubungan internasional menjadi kemitraan yang setara, menekankan transfer pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat. Penekanan pada modal sosial dan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah mencerminkan upaya untuk mendorong model pembangunan yang berakar pada agen lokal.

Pergeseran peran ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga secara mendasar menantang hegemoni pemikiran pembangunan yang selama ini didominasi oleh negara negara maju (Utara). Negara-negara Global South kini secara kolektif membangun artikulasi alternatif yang lebih mengedepankan kedaulatan pembangunan dan keadilan distributif. Upaya reorientasi agenda pembangunan ini menjadi langkah esensial untuk memutus siklus ketergantungan panjang dan ketimpangan struktural ekonomi global yang selama ini melanggengkan posisi asimetris mereka.

Semangat kepemimpinan ini termanifestasi kuat dalam pendekatan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang berlandaskan prinsip solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan, sangat kontras dengan model bantuan tradisional yang kerap mengekang lewat syarat-syarat politis. Kemandirian ini semakin dipertegas dengan hadirnya alternatif pembiayaan pembangunan yang lebih inklusif dan fleksibel—seperti inisiatif institusi keuangan regional mandiri tanpa prasyarat ketat ala lembaga keuangan tradisional. Implikasinya adalah terwujudnya arsitektur pembangunan global yang lebih multipolar, di mana kekuatan penentu arah kebijakan tidak lagi terpusat hanya pada segelintir aktor donor. Keberhasilan Global South dalam mengadvokasi agenda yang inklusif menuntut penguatan kapasitas kelembagaan domestik dan regional, serta koherensi kebijakan lintas sektor. Diperlukan investasi pada riset dan pengembangan berbasis lokal untuk menghasilkan solusi inovatif yang relevan, serta penguatan posisi tawar dalam negosiasi iklim dan perdagangan internasional. Tanpa fondasi yang kuat ini, potensi kepemimpinan mereka dalam membentuk tatanan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan mungkin tidak akan terwujud secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Bramanda, J. (2025). Klasifikasi masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah dengan metode algoritma C4.5. *Jurnal Komputer Antartika, 3*(1), 34–41. https://doi.org/10.70052/jka.v3i1.234

Fadillah, A. N., & Rigianti, H. A. (2024). Pentingnya profesionalisme pendidikan di era globalisasi. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar, 9*(2), 195–202.

Farkhan, M. R., & Maryani, E. (2023). Dari keberagaman entitas menjadi ketimpangan multisektor di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12*(3), 593–604. https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.69580

Fauzi, A., Purwaningsih, N., & Hanafi, M. S. (2025). Makna bantuan dan proses pembelajaran informal: Resiliensi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *ARZUSIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar, 5*(6), 2854–2870. https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i6.8230

Helmys, N., & Irawan, Y. (2023). Identitas Indonesia sebagai negara donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20. *Jurnal Hubungan Luar Negeri, 8*(2), 31–54. https://doi.org/10.70836/jh.v8i2.15

Ikmal, N. M., Prawesti, B. A., R., D. A., & Fajry, M. (2022). Perencanaan pembangunan berbasis partisipasitif dalam penerapan e-Musrenbang. *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 11*(1), 40–52. https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i1.84

Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan melalui kerja sama internasional daerah. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, 13*(1), 113–137. https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366

Jamil, Z. Z. L., Syaf, S., Mahmud, & Erihadiana, M. (2025). Pendidikan demokrasi di era globalisasi: Tantangan dan peluang. *Edukasi: Jurnal Pendidikan, 22*(2), 408–422.

https://doi.org/10.31571/edukasi.v22i2.7627

Lestiana, N. D., & Makhya, S. (2025). Dimensi modal sosial dalam mengoptimalisasikan pembangunan desa induk dan desa hasil pemekaran (Studi komparasi di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 6*(5), 3927–3936. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i5.5702

Nadhirah, S. H., Kuntari, S., & Widiansyah, S. (2026). Mobilitas sosial penerima bantuan pada Program BSPS di Kelurahan Tegal Bunder Kota Cilegon. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, 8*(1), 169–179. https://doi.org/10.33503/maharsi.v8i1.3150

Rivani, E., Alfitri, & Anggraini, N. (2025). Partisipasi penerima bantuan dalam implementasi program rumah swadaya di Kelurahan Gates Nan XX. *SIMBOL: Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, 4*(1), 77–86. https://doi.org/10.55850/simbol.v4i1.182

Saepudin, Pratama, I. C., Audrei, F., & Wibowo, C. A. A. (2024). Agenda the Global South dalam upaya reformasi World Trade Organization (WTO): Perspektif G20 dan BRICS. *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional, 1*(2), 201–226. https://doi.org/10.36722/mondial.v1i2.2878

Saniah, S., & Afrizal, S. (2024). Transformasi sosial penerima bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Desa Cipayung. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 7*(1), 829–836. https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2224

Sembiring, R. A., & Subekti, T. (2021). Analisis aktor dalam tata kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk kualitas internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 7*(1), 31–44. https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.30416

Suherman, R. A., & Asy'ari, M. (2023). Kerja sama multilateral G20 dalam mendukung pemulihan negara-negara rentan terhadap pandemi COVID-19. *Journal of International and Local Studies, 7*(1), 16–27. https://doi.org/10.56326/jils.v7i1.2587

Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 12*(1), 121–128. https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5096

Wiyanto, W., Nugroho, A., & Suwarno, A. (2025). Penerapan teknologi NFC pada sistem pendataan masyarakat penerima bantuan berbasis Android. *Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi, 7*(1), 21–32. https://doi.org/10.31326/sistek.v7i1.2121

Wulandari, A., Perwita, A. A. B., & Hadisancoko, R. E. (2024). The role of defense diplomacy to enhance defense industry in developing countries: Case study of Indonesia and India cooperation. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5*(4), 606–613. https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i4.453

Zuanita, E. (2026). Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pendidikan. *Jurnal Sosial dan Teknologi, 6*(6), 2172–2193. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i6.32895